

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Media massa akan terus mengalami perubahan seiring waktu dan menghadirkan jenis-jenis media baru sejalan dengan kemajuan teknologi. Film dokumenter adalah salah satu bentuk media massa yang terus berkembang seiring kemajuan zaman (Atmoko, 2024). Film dokumenter tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat komunikasi yang mampu menyampaikan pesan dan narasi kompleks tentang realitas sosial, ekonomi, lingkungan hingga politik (Burhan, 2009). Selain itu Film dapat digunakan sebagai alat propaganda untuk mempengaruhi perilaku masyarakat dan meningkatkan kesadaran politik. (Kaukab, 2017), menyatakan bahwa propaganda politik yang juga dikenal sebagai komunikasi politik akan efektif jika penerima pesan dapat memahami informasi politik yang disampaikan oleh komunikator namun, jika penerima tidak bisa mengerti arti pesan tersebut, usaha tersebut akan sia-sia. Dalam dunia politik, film sebagai alat propaganda telah dipakai sejak tahun 1898 pada perang Spanyol dan Amerika. Sejak saat itu, film telah menjadi sarana penting untuk menyebarkan ideologi, membangun citra pemimpin, dan menciptakan dukungan bagi kebijakan atau perang, baik melalui film dokumenter, berita propaganda, maupun film fiksi yang mengandung pesan politis tersembunyi.

Salah satu film dokumenter yang menarik perhatian dalam konteks ini adalah *Dirty Vote*. Film berdurasi 1.57.22 menit ini mengungkap kecurangan pemilu 2024 yang telah dirancang. Dilansir dari liputan 6, film dokumenter “Dirty Vote” menghadirkan tiga ahli hukum tata negara yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera. Para ahli ini secara bergantian menjelaskan mengenai rentetan manipulatif yang dilakukan oleh berbagai paslon (Prastiwi, 2024).

Topik pembahasan film “Dirty Vote” terbilang cukup sensitif mengingat isu yang diangkat mengenai kecurangan dalam pemilu 2024. Hal yang sensitif ini menjadi *trending* topik di berbagai *platform* media sosial. Berbagai kalangan membahas persoalan film tersebut. Mulai dari akademisi hingga pakar hukum. Antusias masyarakat terhadap film ini cukup tinggi. Dapat dibuktikan dalam waktu 24 jam telah mencapai 6 juta kali tayangan di youtube. Hingga saat ini film dokumenter “Dirty Vote” telah ditonton sebanyak 9,8 juta kali dalam kurun waktu 2 bulan setelah rilis (April 2024).

Dilansir dari liputan 6, proses penyelesaian syuting film “Dirty Vote” memakan waktu sekitar dua minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, hingga perilisan. Dalam membuat karya ini melibatkan 20 lembaga diantaranya yaitu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI (Prastiwi, 2024).

Film dokumenter "Dirty Vote" adalah salah satu karya sutradara Dandhy Dwi Laksono yang merupakan seorang mantan jurnalis yang terkenal dengan karyanya. Salah satu karya populer Dandhy adalah film “Sexy Killer”. Film "Sexy Killers" sendiri membeberkan keterkaitan oligarki dengan kedua calon presiden pada saat itu. Film ini tayang ketika masa tenang menjelang pemilu 2019. Sama halnya dengan film dokumenter “Dirty Vote”, sutradara merilis film ini tanggal 11 Februari tepat dua hari sebelum pemilu 2024. Hal ini tentu menjadi polemik di tengah masa tenang pemilu 2024. Dilansir dari web Bawaslu, badan ini menyampaikan bahwa masa kampanye berakhir pada Sabtu 10 Februari 2024. Dengan demikian, masa tenang akan dimulai pada tanggal 11-13 Februari 2024 (Kusmantoro, 2024).

Muncul pro kontra mengenai perilisan film dokumenter “Dirty Vote” ini. Perdebatan yang terjadi mencakup soal tanggal perilisan, posisi akademisi dalam film hingga isi dari konten film tersebut. Berbagai pakar hukum memberikan tanggapan mengenai film ini. Dikutip dari detik.com, Prof I Nyoman Nuryana

sebagai Pakar Hukum Pidana Universitas Brawijaya (UB) Malang menyimpulkan bahwa film “Dirty Vote” sangat tidak tepat dirilis ketika masa tenang. Ia menilai bahwa film ini hanya berisi opini dan asumsi semata. Selain itu, pakar hukum pidana UB ini juga mengkritik tajam mengenai tiga aktor yang mengaku sebagai akademisi. Aktor-aktor tersebut dianggap tidak menunjukkan sikap objektif dan netral yang diharapkan dari seorang akademisi. Menurutnya Seorang akademisi diharapkan untuk selalu mengikuti prinsip-prinsip yang ada ketat (Prastyo, 2024).

Menindaklanjuti persoalan tersebut, dalam wawancara yang dilakukan Zainal dengan UGM Selasa (13/1), film ini secara luas mengeksplorasi isu-isu tata negara, sehingga pandangan yang diadopsi mirip dengan perspektif seseorang yang ingin memperdalam pemahaman tentang tata negara. Ia juga menanggapi persoalan mengenai isi film yang dinilai sebagai opini. Zainal bercerita bahwa sebelum memulai proses produksi film, mereka telah melakukan diskusi selama proses riset. Jika ada bukti yang dianggap kurang kuat atau kurang meyakinkan, itu tidak akan ditayangkan ke dalam film. Ia juga menambahkan mengenai isi film “Dirty Vote”. Menurutnya, Film ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana kritik, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan pandangan kepada masyarakat mengenai pentingnya hak pilih mereka (Ardhi, 2024). Hal ini sejalan dengan tujuan sutradara film “Dirty Vote” yaitu ingin memberikan pemahaman mengenai kecurangan yang terjadi ketika menjelang pemilu 2024 secara luas kepada masyarakat.

Dikutip dari liputan 6, Dandhy selaku sutradara film “Dirty Vote” mengatakan bahwa maksud dari film ini adalah sebagai edukasi kepada masyarakat yang akan menggunakan hak pilih mereka pada pemungutan suara 2024. Ia menambahkan bahwa tidak ada maksud lain, apalagi menjatuhkan salah satu kubu paslon (Pasangan Calon) (Prastiwi, 2024). Penonton film dokumenter “Dirty Vote” juga menuangkan pendapat mereka dalam kolom komentar. Mengutip top komentar dari akun @hadyirfan4275 mengatakan bahwa “Video ini bukan untuk menjelekkan paslon manapun, tetapi untuk mencerdaskan bangsa, mengedukasi dan menyampaikan kecurangan yang luar biasa dalam pemilu 2024, soal pilihan itu hak kalian semua, semoga sadar bagaimana kecurangan pemilu tahun 2024 terjadi, siapa tokoh-tokoh atau dalang dibalik ini semua dan tidak semua orang mau, bisa

dan menerima menonton video ini,” tulisnya. Sependapat dengan sutradara dan penonton lain, *user @foreunhoo* memberikan tanggapan mengenai film dokumenter “Dirty Vote” dalam kolom komentar, “Kenapa orang sulit mengerti kalau video ini bukan untuk mendukung paslon tertentu, melainkan membantu masyarakat untuk melihat bagaimana mudahnya hukum dan konstitusi negara diacak-acak oleh pejabat. Kekuasaan di tangan rakyat? Tidak, sekarang kita hanya dimanfaatkan demi kepentingan pribadi. BANGUN. Jangan mau dipermainkan!” tulisnya. Selain memberikan edukasi, film ini dapat membuka wawasan tentang kepedulian masa depan bangsa dan Negara terutama dalam dunia politik. Mengutip tweet dari X, dengan *username @Lembur_LeutikII* menulis bahwa, keren nih film dokumenter dirty vote, membuka wawasan memilih dan kepedulian kepada bangsa dan Negara, terutama gen Z. Penikmat film “Dirty Vote” kebanyakan merupakan generasi milenial dan gen z yang mana terbiasa mencari informasi menggunakan media sosial.

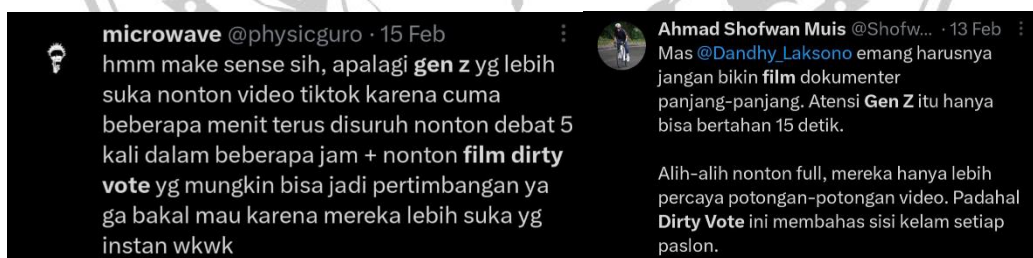


Gambar 1.1 Tweet netizen di X

Generasi z merupakan generasi yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap internet khususnya media sosial. Dalam penelitian ini, mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik termasuk ke dalam generasi z yang akan menjadi subjek penelitian. Intensitas penggunaan media sosial yang dilakukan generasi z dalam seharinya bisa menghabiskan waktu sekitar 6 sampai 7 jam, sementara itu, sekitar 44% dari mereka secara teratur memeriksa akun media sosial setiap jamnya (Mulyadi, 2019). Generasi ini lahir pada kurun tahun 1995-2010. Mereka dikenal sebagai generasi asli digital karena telah tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sangat terpengaruh oleh teknologi internet dan *smartphone* sejak usia dini (Francis, 2018). Perkembangan teknologi yang pesat, membuat berbagai inovasi untuk mempermudah aktivitas manusia. Gen z tentu terbiasa dengan kemudahan akses yang ada. Dengan begitu mereka cenderung melakukan semua

hal dalam serba instan (Budiati, 2018). Namun kebiasaan ini mengarah kedalam hal yang negatif. Generasi ini akan malas melakukan sesuatu yang mereka nilai tidak mudah atau sulit dilakukan. Contoh kasus seperti film dokumenter “Dirty Vote” yang membahas soal rangkaian kecurangan pemilu 2024 dalam waktu 2 jam. Film ini terbilang seperti video pembelajaran dengan metode presentasi. Generasi z yang terbiasa dengan hal yang instan tentu mencari kesimpulan dari film tersebut. Mereka akan menggunakan aplikasi yang menyediakan video pendek untuk mencari informasi mengenai film “Dirty Vote”. Dengan begitu banyak simpang siur mengenai konten film tersebut.

Menanggapi persoalan tersebut, terdapat tweet dengan *username* @physicguro yang meretweet konten mengenai pemilu 2024. Ia menuliskan, “Hmm *make sense* sih, apalagi gen z yang lebih suka nonton video tiktok karena cuma beberapa menit terus disuruh nonton debat 5 kali dalam beberapa jam + nonton film dirty vote yang mungkin bisa jadi pertimbangan yaa ga bakal mau karena mereka lebih suka instan wkwk”. Tidak hanya itu, netizen dengan *username* @ShofwanMuis pun melontarkan pendapatnya kepada sutradara film melalui tweetnya. “Mas @Dandhy_Laksono emang harusnya jangan bikin film dokumenter panjang-panjang. Atensi gen z itu hanya bisa bertahan 15 detik. Alih alih nonton full, mereka hanya lebih percaya potongan-potongan video. Padahal Dirty Vote membahas isi kelim setiap paslon”, tulisnya.



Gambar 1.2 Tweet netizen di X

Gambar 1.3 Tweet netizen di X

Menurut data dari PISA (*Programme for International Student Assessment*) yang dilansir dari pendidikan.id (2023), menunjukkan bahwa peringkat literasi membaca Indonesia pada tahun 2022 masih menduduki peringkat 11 terbawah dari 81 negara yang masuk kedalam data. Budaya literasi generasi z terbilang masih

minim. Hal ini terjadi karena akibat gempuran teknologi yang menawarkan semua hal dalam bentuk instan. Generasi ini dituntut untuk bisa kritis, inovatif, berwawasan luas serta paham mengenai polemik yang terjadi. Namun kenyataannya yang terjadi saat ini masih jauh dari tuntutan tersebut.

Generasi Z diusung-usung akan menjadi penerus bangsa pada Indonesia emas 2045 mendatang. Peran generasi ini penting untuk kemajuan bangsa dan negara. *Skill* berpikir kritis dalam memutuskan suatu perkara perlu dimiliki. Sebagian orang berpendapat bahwa film ini mampu mempengaruhi penonton, namun ada juga yang berpendapat bahwa pengaruhnya tidak begitu signifikan bagi mereka. Salah satu tweet @OdangWahid16104 menuliskan “Gk ngaruh, biasa lah takut capresnya kalah jadi segala cara digunakan, termasuk dirty vote, Dirty Vote film bok*p politik”. Pasalnya film dokumenter ini dinilai untuk menjatuhkan salah satu paslon. Namun pada kenyataannya film ini dibuat untuk menyampaikan bagaimana kecurangan yang terjadi pada pemilu 2024 tanpa menjatuhkan paslon manapun. Lebih jelasnya sudah tertulis dalam deskripsi akun youtube dirty vote “Mengungkap desain kecurangan pemilu 2024”.



Gambar 1.4 Tweet netizen di X

Posisi film dokumenter ini hanya sebagai bentuk kritik yang ada pada sistem pemerintahan. Seperti yang dikatakan oleh Zainal dalam wawancara yang dilakukan dengan UGM Selasa (13/1), menurutnya, kecurangan dalam pemilu bukan merupakan hal yang baru dalam demokrasi. Pelanggaran terhadap prinsip demokrasi, konflik kepentingan, dan manipulasi politik sering kali terjadi (Ardhi, 2024). Masalah yang berlarut-larut ini telah menjadi bagian dari sistem yang sulit untuk dikendalikan. Oleh karena itu, pentingnya kritik yang dituangkan dalam film dokumenter "Dirty Vote" dan juga kritik yang dilakukan pada tahun-tahun

sebelumnya. Kecurangan pada pemilu 2024 menjadi perhatian utama dalam diskusi publik. Hal ini yang membuat film dokumenter “Dirty Vote” banyak diulas oleh berbagai masyarakat hingga menimbulkan berbagai resepsi yang berbeda-beda.

Resepsi tidak bisa terlepas dari kegiatan menonton sebuah film baik itu film dokumenter. Teori analisis resepsi yang diperkenalkan oleh Stuart Hall (1980) berfokus pada bagaimana suatu khalayak mengartikan konten media. Hall menjelaskan bahwa teori ini berkaitan dengan pola komunikasi Encoding-Decoding, di mana produsen pesan dapat menciptakan makna tertentu dalam suatu pesan, dan khalayak memiliki kemampuan untuk merekonstruksi isi pesan tersebut (Ghassani, 2019). Resepsi memiliki arti menerima, dimana ketika menonton film, penonton akan menerima dan memproses pesan dari tayangan yang disampaikan. Setiap manusia memiliki resepsi yang berbeda-beda tentang objek. Dalam proses ini ada tahap yang mana seseorang akan menerima terlebih dahulu stimulus yang dikirimkan oleh pengirim pesan.

Penelitian ini akan difokuskan dalam upaya memahami bagaimana pandangan penonton khususnya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang yang termasuk kedalam generasi z dalam memproses pesan yang ada pada film. Tujuan pokok dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana penonton menafsirkan film dokumenter "Dirty Vote", sehingga dapat dievaluasi sejauh mana pesan yang disampaikan oleh pembuat film sesuai dengan resepsi yang diterima oleh penonton.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana resepsi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang 2020 mengenai kecurangan dalam film dokumenter Dirty Vote?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana resepsi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang 2020 mengenai kecurangan dalam film dokumenter “Dirty Vote”.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara umum dapat menjadi bahan pengetahuan dan perkembangan ilmu komunikasi khususnya dalam memahami resepsi pesan.

2. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memperkaya dan mengembangkan teori terutama pada bidang ilmu komunikasi, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan yang berharga bagi perkembangan dan pemahaman lebih lanjut dalam bidang ilmu komunikasi.